

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan antar media elektronik. Adanya perkembangan zaman membuat teknologi internet semakin maju, canggih, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pengguna internet. Indonesia adalah negara pengguna internet terbesar ke 5 di dunia dengan pengguna internetnya mencapai 144 juta pengguna. Indonesia pada umumnya, pengguna internet didominasi pada usia 15 sampai 19 tahun. Pulau Jawa adalah pengguna internet terbanyak di Indonesia yaitu 55% secara keseluruhan Indonesia. Pengguna internet terbesar di pulau Jawa adalah provinsi Jawa Barat yaitu dengan pengguna internetnya mencapai angka 16%.

Komunikasi menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam berbagai masalah dalam berbagai bidang yang ada, termasuk dalam konsep pemerintahan. Komunikasi dapat diartikan sebagai interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau suatu informasi kepada orang lain. Komunikasi yang berkualitas merupakan komunikasi yang mudah dimengerti dan diterima oleh orang lain. Komunikasi pemerintah adalah suatu penyampaian ide, program, dan gagasan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan atau target sehingga menjadi negara lebih baik. Secara umum, kualitas komunikasi yang diutarakan pemerintah kepada masyarakat sangat penting bagi kesejahteraan

masyarakat dan negara. Pemerintah harus terlibat secara konstan dalam peran pertukaran informasi dan komunikasi yang melibatkan suatu kebijakan, ide atau gagasan dan suatu keputusan antara pemerintah dan warga negara. Teori media baru yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih dan didukung dengan komunikasi seperti sekarang, menjadikan komunikasi pemerintah sebuah industri yang sangat berkembang di negara yang dimaksud pemerintah bekerja sama dengan agen komunikasi guna meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Di sinilah muncul istilah profesionalisasi komunikasi pemerintah.

Globalisasi yang tidak dapat dikendalikan yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dan informatika selama ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi negara yang ditandai dengan memudahkan akses dalam penggunaan internet melalui media sosial mengakibatkan meningkatkan kecepatan penyebaran berita di negara Indonesia. Media sosial memiliki peran penting dalam menyajikan atau memberika berita yang berkaitan dengan kehidupan atau negara saat ini kepada masyarakat, sehingga media sosial dapat dengan mudah diakses dimana dan kapan saja. Secara umum, media sosial adalah media yang mempublikasikan suatu konten berupa profil, aktivitas, dan memberi ruang bagi pengguna untuk berinteraksi di ruang Sapu Bersih (Siber). Sapu Bersih (Siber) adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet.

Adanya kemajuan kecanggihan informasi dan komunikasi yang berkembang dengan cepat informasi berita didapatkan oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai sumber media. Adapun media sosial ini dapat mendampakan

positif dari perkembangan media sosial berupa dengan menjadi silaturahmi dengan orang-orang berbeda pulau maupun orang-orang dengan negara lain, memudahkan dalam transaksi jual beli yang dikenal dengan transaksi online atau melakukan promosi suatu produk secara online tanpa harus bertatap muka dan dapat dengan mudah penyebaran dan instan informasi atau berita negara terbaru. Namun, informasi yang diberikan harus memiliki identitas yang jelas agar terjaminnya sumber dari informasi terkait. Pihak penerima informasi atau berita harus mengetahui identitas pemberi informasi dan dapat menilai dengan cerdas menerima informasi tersebut, jika berita atau informasi tidak jelas identitas dan kebenarannya maka, informasi atau berita ini dinamakan dengan berita bohong atau informasi bohong yang dikenal dengan berita hoaks atau informasi hoaks. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hoaks adalah sesuatu informasi yang mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun seolah-olah menjadi suatu kebenaran.

Berita hoaks menjadi suatu topik pemberitaan yang mampu mencintakan keresahan pada masyarakat hingga mampu menyulutkan emosi, dan sentimental masyarakat, pada kenyataannya berita hoaks selalu mengangkat isu dengan topik yang umumnya mengkaitkan aktor politik yang memiliki pengaruh besar dalam negara. Isu dari berita hoaks seringkali tidak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi ada tekanan yang terus menerus dilakukan oleh media sehingga menjadikan isu itu penting sehingga adanya perubahan sikap pada masyarakat.

Dampak adanya berita hoaks ini bagi negara yaitu dapat terjadi perpecahan dalam masyarakat, konflik sosial, dan timbulnya rasa kebencian. Di Indonesia banyak kasus yang dikategorikan dalam berita hoaks, khususnya daerah bandung. Sebagai salah satu contoh berita hoaks atau informasi hoaks yang terjadi di daerah bandung yaitu berita yang di publikasikan melalui media [tribunnews.com](http://tribunnews.com) pada tanggal 28 Mei 2019 ini berjudul “Dokter RS Terkenal di Bandung Diringkus Polisi, Tersandung Kasus Penyebaran Berita Hoaks” dalam berita ini dokter terkait ujaran kebencian melalui media sosial yaitu Fecebook. (<https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/28/dokter-rs-terkenal-di-bandung-diringkus-polisi-tersandung-kasus-penyebaran-berita-hoax>. diakses pada tanggal 13 Maret 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa masih terdapat penyebaran hoaks yang terjadi di salah satu wilayah jawa barat yang akan didukung oleh penjelasan dari 2 berita dibawah ini yang dipublikasikan melalui sebagai berikut :

Media [Galamedianews.com](http://Galamedianews.com) yang dipublikasikan pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut :

**BANDUNG, Galamedianews.com-** TIM Jabar Saber Hoax berhasil menangani 5 ribu Hoax. Isu yang paling banyak dijadikan sebagai bahan utama hoax ialah isu politik.

"Sampai dengan hari ini, Tim Saber Hoax telah menangani 5 ribu hoax bahkan lebih. 30 persennya merupakan hoax yang berkaitan dengan politik," beber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Diskominfo Jabar), Setiaji saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (1/1/2020).

Diprediksi Setiaji, tim Jabar Saber Hoax akan bekerja lebih ekstra pada tahun 2020 ini. Pasalnya, ada delapan kabupaten/kota di wilayah Jabar yang bakal menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Delapan daerah Jabar tersebut yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.

"Tentunya tujuan utama kita agar hoax yang berkaitan dengan politik tidak sampai berkembang dan merugikan warga," tegas Setiaji. (<https://www.galamedianews.com/?arsip=243343&judul=tim-jabar-saber-tangani-5-ribu-hoax> diakses pada tanggal 2 April 2020).

Media News.detik.com yang dipublikasikan pada tanggal 29 Agustus 2019, menyatakan bahwa terdapat 4.454 aduan untuk berita hoaks yang masuk ke Jabar Saber Hoaks. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Diskominfo Jawa Barat), hoaks muncul karena masyarakat mudah menyebarkan informasi yang belum sahih kebenarannya. Untuk itu, sosialisasi terhadap tokoh masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) penting dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks. Kepala Diskominfo Jawa Barat mengatakan sumber hoaks masih terus bermunculan di Jawa Barat, yang dilakukan Diskominfor Jawa Barat dan Jabar Saber Hoaks (JHS) sosialisasi mengenai pencegahan berita hoaks secara rutin. Selain mengklasifikasikan informasi, Jabar Saber Hoaks (JSH) juga bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat Jabar sehingga tidak mudah percaya hoaks. Kepala Diskominfo Jawa Barat mengatakan bahwa yang paling terpenting adalah bagaimana mengedukasi warganya agar tidak langsung menyebarkan tetapi informasi yang didapat disaring terlebih dahulu. Jabar Saber Hoaks adalah salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdapro) Jawa Barat yang bernaungan dibawah Diskominfo Jawa Barat. Terbentuknya Tim Saber Jawa Barat ini diresmikan oleh

Ridwan Kamil pada tanggal 7 Desember 2018. (<https://news.detik.com/berita/d-4685834/jabar-saber-hoaks-klarifikasi-2643-berita-bohong-di-medsos> diakses pada tanggal 2 April 2020).

Berdasarkan berita diatas, dapat dipahami bahwa masih terdapat banyak sekali penyebaran berita hoaks yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat membentuknya Tim Saber, maka dari itu penyebaran berita hoaks harus selalu dipantau dan di bersihkan.

Media sosial di era sekarang pada umumnya sering digunakan tanpa adanya rasa bertanggung jawab dari pihak-pihak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu. Sebagai pihak yang menyebarkan informasi tanpa memverifikasi terlebih dahulu informasi atau berita yang disebarkan itu benar atau palsu dari sumber berita yang di dapatkan. Pergeseran fungsi yang ada pada media sosial tersebut dapat membuat media sosial yang tadinya bermanfaat bagi banyak pihak menjadi hal yang merugikan berbagai pihak dengan media sosial menjadi sarangnya atau tempatnya berita hoaks. Ancaman berita hoaks tidak hanya menjadi suatu hal yang meresahkan, akan tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi negara dan bangsa. Hal ini marak berlangsung pada situasi politik tertentu, misalnya menjelang pemilihan umum. Pada saat inilah terdapat indikasi adanya persaingan politik dari setiap pasangan calon yang diajukan oleh setiap partai politik. Kondisi semacam ini menjadi tuntutan kepada pemerintah untuk menciptakan kondisi demokrasi yang berasaskan kejujuran, bersih dan adil. Berita hoaks tidak hanya meresahkan, akan tetapi dapat menimbulkan perusakan yang

ada pada dasar negara indonesia yaitu Pancasila pada Sila ke-3 yang berbunyi persatuan indonesia.

Dalam penelitian ini ditemukan masalah mengenai pencegahan berita hoaks yaitu, pertama, terus berkembangnya penyebaran berita hoaks tanpa diketahui asal muasal berita tersebut sehingga hal ini menjadi suatu masalah yang harus di cari solusinya oleh Pemerintah Jawa Barat. Penyebaran berita hoaks ini ternyata menurut pengamatan peneliti terjadi karena yang pertama, kurangnya kredibilitas, yang artinya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyampaikan pesan karena pemerintah kurang meyakinkan masyarakat dalam menyajikan pesan-pesan terkait berita hoaks sehingga masih terdapat hoaks di Jawa Barat. Hal ini peneliti lihat dari masih banyaknya laporan adanya penyebaran berita hoaks dimuat dalam News.detik.com dengan judul Jabar Saber Hoaks Klarifikasi 2.643 Berita Bohong di Medsos.

. Kedua, kurangnya daya tarik masyarakat terhadap Pemerintah Jawa Barat dalam menyampaikan inti-inti pesan terkait hoaks kepada masyarakat. Hal ini peneliti lihat dari masih adanya warga yang bermain *smartphone* pada saat pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyebaran berita hoaks. Peneliti lihat melalui media Youtube.com dengan judul Diskominfo Jabar - Sosialisasi JSH di Kabupaten Garut.

Ketiga, kurangnya *power, power* diartikan sebagai motivasi. Motivasi yang diberikan pihak pemerintah sebagai komunikator kurang dapat memotivasi masyarakat sebagai komunikan dalam menyadarkan bahwa pentingnya dan bahayanya adanya penyebaran berita hoaks. Hal ini peneliti lihat dari masih

banyaknya laporan adanya penyebaran berita hoaks dimuat dalam News.detik.com dengan judul Jabar Saber Hoaks Klarifikasi 2.643 Berita Bohong di Medsos

Keempat, eksistensi komunikasi menurut pengamatan sementara peneliti masih tergolong biasa saja dalam pengemasan pesan terkait hoaks yang disampaikan pihak pemerintah, sehingga pemerintah Jawa Barat tidak mampu mengunggah dan membangkitkan inspirasi masyarakat. Hal ini peneliti lihat dari presentasi tentang pencegahan penyebaran berita hoaks yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat yang berada pada media Youtube.com dengan judul Diskominfo Jabar - Sosialisasi Jabar Saber Hoaks di Kota Bekasi.

Kelima, *setting* yaitu komunikasi yang kondusif dalam artian nyaman, menyenangkan, dan menantang. Pengamatan sementara peneliti yaitu pemerintah dalam menciptakan kondisi dalam penyampaian pesan terkait berita hoaks tergolong tidak kreatif dalam artian pemerintah menyampaikan pesan kepada masyarakat sekedar hanya menyampaikan dampak bahaya berita hoaks tanpa melihat apakah komunikasi merasa nyaman, terhibur atau menantang diri untuk mengikuti pemerintah. Hal ini peneliti lihat dari media Youtube.com dengan akun Diskominfo Jawa Barat yang berkaitan dengan sosialisasi pencegahan penyebaran berita hoaks.

Kelima, mekanisme dalam penyampaian pesan dapat berupa penggunaan bahasa atau media, pemerintah Jawa Barat dalam penyampaian pesan menurut pengamatan sementara peneliti kurang mendalam kepada masyarakat karena pesan terkait hoaks ini hanya disampaikan kepada golongan masyarakat tertentu



saja tanpa tahu apakah golongan masyarakat tersebut menyampaikan pesan yang didapat kepada masyarakat sekitar. Hal ini peneliti lihat dari media Youtube.com dengan akun Diskominfo Jawa Barat yang berkaitan dengan sosialisasi pencegahan penyebaran berita hoaks.

Mengingat berita hoaks dapat menyebabkan perpecahan pada negara berdasarkan Pancasila pada sila ke-3 yang berbunyi persatuan indonesia. Kebijakan terkait penyebaran berita hoaks telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian terkait pencegahan penyebaran berita hoaks yaitu berjudul *Analisis Fenomena Hoaks Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoaks* oleh Roida (2017), dengan hasil Hoaks telah menimbulkan keresahan masyarakat bahkan dapat memecahkan persatuan. Solusi untuk mengatasi hoaks adalah membangun daya pikir atau pola pikir masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam melakukan literasi informasi, mengecek kebenaran informasi, sebelum menyebarkan informasi melalui media sosial, pemerintah harus cepat dan tangga terhadap hoaks. Meskipun pemerintah membentuk satgas anti hoaks, pemerintah tetap diharapkan melakukan verifikasi atau akreditasi terhadap media mainstream

atau penyedia informasi berita oleh televisi, Koran, dan media sosial, termasuk akreditasi dan independensi wartawan yang menyajikan informasi, menutup situs penyebar berita hoaks, dan giat dalam mensosialisasikan dan menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. adapun penelitian Roida memiliki persamaan yaitu metode penelitian kualitatif dan berbicara tentang hoaks, sedangkan perbedaan penelitian Roida dengan penelitian ini adalah Penelitian Roida menggunakan teori Zarella sedangkan penelitian ini menggunakan teori Erliana Hasan.

Adapun penelitian terdahulu lainnya oleh Sutantohadi (2018) berjudul *Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat* dengan hasil Metode penyuluhan yang melibatkan beberapa pihak sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mewaspadaai bahaya berita hoaks dan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, masyarakat diharapkan lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial dengan memastikan akurasi konten, klarifikasi kebenaran, memastikan maafnya, dan identitas informasi jelas. Adapun persamaan dalam penelitian Sutantohadi dengan penelitian ini adalah berbicara tentang hoaks, sedangkan perbedaan penelitian Sutantohadi dengan penelitian ini adalah penelitian Sutantohadi tidak menjelaskan teori apa yang digunakan sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari Erliana Hasan.

Penelitian terdahulu lainnya oleh Tatik Fidowaty, Olih Solihin, dan Poni Sukaesih Kurniati (2018) berjudul *Government Communication Strategy of Bandung City in Socialization of Regulation Concerning Administrative Sanctions*

*of Littering* dengan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atas sanksi administratif untuk membuang sampah yang sewenang-wenang belum efektif karena tidak keberlanjutan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan penerapan sanksi administrasi yang tidak ketat sehingga masyarakat menjadi tidak memihak terhadap peraturan tersebut. Adapun persamaan penelitian Tatik Fidowaty, Olih Solihin, dan Poni Sukaesih Kurniati dengan penelitian ini yaitu penggunaan metode penulisan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membicarakan tentang komunikasi pemerintahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Tatik Fidowaty, Olih Solihin, dan Poni Sukaesih Kurniati membicarakan tentang Strategi komunikasi pemerintah Kota Bandung dalam sosialisasi peraturan mengenai sanksi administrasi Littering sedangkan penelitian ini membicarakan tentang komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam pencegahan penyebaran berita hoaks.

Penelitian terdahulu lainnya oleh Monica (2018) berjudul *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran hoaks* dengan hasil Upaya kepolisian dalam penanggulangan penyebaran berita hoaks melalui cara Pre-emptif yaitu penanam nilai atau norma terhadap masyarakat, cara preventif yaitu menindak lanjuti dari upaya Pre-emptif dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan cara refresif yaitu penyidikan, proses penuntutan dan terakhir proses sidang pengadilan. Masyarakat di anjurkan lebih selektif dalam menyebarkan informasi yang belum terakurasi dalam kebenarannya, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Monica adalah berbicara cara

pencegahan berita hoaks, sedangkan perbedaan dari penelitian Monica dan penelitian ini adalah penelitian Monica yaitu mengungkapkan cara kepolisian dalam penanggulangan berita hoaks, sedangkan penelitian ini mengungkapkan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencegahan penyebaran berita hoaks.

Adanya dampak yang ditimbulkan dengan hadirnya berita hoaks dan masyarakat yang seperti ini membuat Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat harus bertindak demi menjaga persatuan masyarakat dan negaranya. Dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat perlu untuk melakukan penyampaian pemahaman kepada masyarakat tentang makna berita hoaks, seperti apa berita hoaks, dampak dari berita hoaks, pencegahan berita hoaks, hukum yang berlaku bila menyebarkan berita hoaks dan dengan dibantu oleh instansi-instansi lainnya. Masyarakat Jawa Barat memiliki karakteristik yang berbeda-beda maka Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dapat memperhatikan komunikasi seperti apa yang dapat membuat masyarakat mengenal berita hoaks dan dapat membuat masyarakat meminimalisir penerimaan berita hoaks beserta adanya dampak-dampak yang muncul akibat berita hoaks. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Komunikasi Pemerintah Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoaks Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat Oleh Dinas Informasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut, peneliti ingin menarik sebuah rumusan masalah: bagaimana komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat melalui karakteristik komunikator yaitu kredibilitas, daya tarik, *power*, eksistensi komunikasi, *setting* komunikasi, dan mekanisme penyampaian pesan ?

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kredibilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan penyebaran berita hoaks.
2. Untuk mengetahui Daya Tarik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan penyebaran berita hoaks.
3. Untuk mengetahui *power* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan penyebaran berita hoaks.
4. Untuk mengetahui eksistensi komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan penyebaran berita hoaks.
5. Untuk mengetahui *setting* komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan penyebaran berita hoaks.

6. Untuk mengetahui mekanisme penyampaian pesan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan penyebaran berita hoaks.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua kategori kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya ilmu pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan analisis komunikasi pemerintah khususnya tentang pencegahan berita hoaks.

- b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Jawa Barat maupun aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman mengenai pencegahan berita hoaks pada wilayah Jawa Barat.